



SATU DATA BENCANA INDONESIA (SDBI) SEBAGAI ACUAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM MENJAGA MOMENTUM PEMBANGUNAN NASIONAL

Hal Ichbal, Adi Subiyanto, Ernalem Bangun, Pujo Widodo, Wilopo

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan RI, Jakarta

Abstrak

Indonesia has a high disaster risk and is exacerbated by climate change which has the potential to disrupt development momentum and achievements. "One Indonesian Disaster Data (SDBI)" which includes management of data and statistics on disaster risk, occurrence, impact and recovery. SDBI is a contribution to fulfilling the state's obligation to protect the Indonesian people from the risks, occurrences and impacts of disasters. Disaster Management (BNPB) and the Central Statistics Agency (BPS) jointly developed Indonesia's National Agency for One Disaster Data (SDBI) as the official sectoral statistics domain in the National Statistical System to Disaster Statistical Framework (DRFS) established by UN ESCAP and designed according to the principles One Indonesian Data. Based on the description above, this research needs to be carried out to increase knowledge and provide broad insights about disaster data as a reference for the government and its implementation for decision makers. The method used is qualitative with a descriptive approach: collecting data by observation, in-depth interviews, and documentation; data analysis techniques by means of data collection, data reduction, and data presentation. The SDBI platform is outlined in the National Disaster Management Agency (BNPB) Regulation Number 1 of 2023 concerning One Disaster Data. There are several obstacles in SDBI, namely weak coordination, methodologies that are not yet standardized, and poor communication. The conclusion from this study is that the practice of disaster management methodologies and procedures for data collection and management should be shared among technical working groups to ensure coordination. It is necessary to form a technical working group consisting of BPS, BNPB and BIG to reduce obstacles in the implementation of One Indonesian Disaster Data so that national development continues.

Kata Kunci: National Development, BNPB, BPS, and One disaster data.

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 menetapkan ketahanan bencana diantara prioritas nasional dimana salah satu strateginya adalah penguatan data dan informasi terkait bencana. Pada tahun 2022, menurut Data Bencana Indonesia (DIBI) dan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi

3.531 kejadian bencana alam di Indonesia. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dengan jumlah kejadian sebanyak 1.524 kejadian, yang merupakan 43,1% dari total kejadian bencana nasional. Selama tahun 2022 juga terjadi 1.062 kejadian cuaca ekstrim, 634 longsor, 252 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 28 gempa bumi, 26 gelombang pasang/abrasi, dan 4 kekeringan. Provinsi yang paling banyak mengalami bencana alam pada tahun 2022 adalah Jawa Barat sebanyak 823 kejadian, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 486 dan 400 kejadian. Semua bencana ini menyebabkan lebih dari 5,49 juta orang menderita dan mengungsi, 851 kematian, 8.726 luka-luka, dan 46 orang hilang. Bencana tersebut juga menyebabkan 95.051 rumah rusak, dengan rincian 20.069 rusak berat, 23.058 rusak sedang, dan 51.294 rusak ringan. Selain itu, 1.980 fasilitas umum rusak, terdiri dari 1.239 fasilitas pendidikan, 646 tempat ibadah, dan 95 fasilitas kesehatan. (Covid19, 2023).

Dampak terjadinya bencana alam, teknologi, dan biologi di Indonesia setiap tahunnya telah menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang mengganggu keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah, serta respon yang kurang tepat dan lamban menyebabkan korban dan berbagai infrastruktur seperti transportasi,

komunikasi, dan penanggulangan keadaan darurat lumpuh. Pada masa tanggap darurat proses pengelolaan bantuan yang terkadang masih birokratis dan terkesan lamban menyebabkan bertambahnya korban. Dampak tersebut sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Oleh karena itu, perhatian terhadap lokasi bencana, serta interaksi, proses, dan struktur data spasial menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana.

Efek dari bencana dapat dihubungkan dengan contoh bencana tertentu. Penting untuk mengatur dan mencatat statistik ini dengan cara yang menghubungkannya dengan ciri-ciri bencana alam yang relevan, seperti indikator yang dipantau untuk mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan bencana di masa mendatang. Kesulitan utama dalam menyusun statistik bencana adalah membuatnya mudah diakses untuk tujuan dan analisis yang beragam sambil memastikan bahwa koleksi tetap seragam dan koheren dengan memanfaatkan metadata terstruktur. Pengumpulan statistik yang berkaitan dengan bencana dapat diterapkan pada bencana dengan skala atau besaran apa pun dan terdapat permintaan yang jelas untuk kerangka pengukuran yang koheren secara nasional untuk diterapkan pada skala yang berbeda. (PBB, 2015).

Dalam praktik umum di Indonesia, kebutuhan data bencana dipenuhi secara ad-hoc, terutama dalam bentuk data tanggap darurat. Meskipun beberapa model pengumpulan data sudah ada, seperti InaRisk sebagai platform pemetaan geografis yang kompleks dengan potensi untuk menjadi platform data bencana tunggal, data risiko bencana, kejadian, dampak, serta pembiayaan dan perbaikan masih perlu

didasarkan pada konsep dan definisi standar. . Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama mengembangkan Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai domain statistik sektoral resmi dalam National Statistical System to Disaster Statistical Framework (DRFS) yang dibentuk oleh UN ESCAP dan dirancang mengikuti prinsip Satu Data Indonesia (UN ESCAP, 2018).

Data dan statistik memiliki peran penting dalam pelaksanaan termasuk pemantauan dan pelaporan penanggulangan bencana. Mulai dari pencegahan risiko, kesiapsiagaan, hingga respon pemulihan. Kebutuhan akan data yang tepat waktu dan akurat menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa bencana yang diperparah oleh dampak perubahan iklim. Tantangannya adalah bahwa data yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana yang efektif tidak selalu tersedia saat dibutuhkan. Kalaupun tersedia, seringkali data tersebut tersebar di berbagai sumber resmi, kemudian berbeda satu sama lain atau bahkan bertentangan, baik secara metodologis maupun substansial. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik untuk menyediakan data kunci yang relevan dengan semua tahapan penanggulangan bencana. Data bencana yang baik juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi risiko bencana untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penelitian dengan judul “**Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) Sebagai Acuan Penanggulangan Bencana dalam Menjaga Momentum Pembangunan Nasional**” perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih

luas tentang data bencana sebagai acuan pemerintah dan implementasinya bagi para pengambil keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh data. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang mengusulkan untuk melakukan penelitian semata-mata terhadap fakta atau fenomena yang ada secara empiris hidup di dalam penutur sehingga apa yang dihasilkan atau direkam berupa pemaparan sebagaimana adanya. Penyusunan naskah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian memahaminya secara seksama sesuai temuan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan subyek yang terlibat sejak awal pelaksanaan Satu Data Bencana Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Satu Data Bencana adalah sebagai dasar analisis kecenderungan lintas kejadian untuk keperluan peningkatan mutu pengkajian risiko kearah perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk itu, SDBI mempunyai cakupan yang meliputi, pertama, data terkait risiko bencana, yakni data tentang ancaman, kerentanan, keterpaparan, serta kemampuan terkait ketangguhan menghadapi potensi peristiwa bencana. Kedua, data terkait peristiwa bencana yang meliputi ciri-ciri peristiwa, jenis kejadiannya, tempat serta waktu awal dan akhir peristiwa bencana, kemudian status bencananya.

Ketiga adalah data tentang dampak terhadap manusia, kerusakan termasuk pada infrastruktur krusial, kerugian material dan ekonomis, gangguan pada pelayanan dasar, dan dampak terhadap lingkungan dan warisan budaya. Satu Data Bencana Indonesia untuk Pembangunan Nasional Indonesia dapat dipaparkan melalui pembahasan berikut ini:

1. Kerangka Regulasi

Sebagai kerangka statistik yang merupakan bagian integral dari Sistem Statistik Nasional, SDBI didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana, statistik, pemerintahan daerah, dan pengelolaan data, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- k) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana.

Regulasi baseline tersebut mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) bukan hanya upaya pemanfaatan data secara internal dan antar instansi pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban pemenuhan hak dan kebutuhan publik atas data guna mengurangi risiko dan dampak bencana. SDBI memanfaatkan data yang tersedia untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk semua tahapan penanggulangan bencana, termasuk penilaian risiko, pencegahan, dan mitigasi, serta untuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan pemulihan, serta pembiayaan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana. Mukaram dan Kusumasari (2019) menjelaskan implementasi Satu Data Bencana Indonesia dapat dianalisis dari segi proses pembuatan kebijakan,

termasuk pengembangan kebijakan dan regulasi untuk mendukung implementasi sistem, serta dampak dari sistem tersebut. tentang manajemen risiko bencana dan pembangunan nasional. Studi ini menemukan bahwa penerapan sistem tersebut didukung oleh berbagai dokumen kebijakan dan peraturan, termasuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Bencana.

2. Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional Indonesia yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Konsep pembangunan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan lingkungan secara seimbang dan terpadu. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Satu Data Bencana Indonesia dapat dianalisis kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui integrasi data bencana dan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Salah

satu kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi Satu Data Bencana Indonesia adalah Kerangka Kerja Pengurangan Risiko dan Ketahanan Bencana. Kerangka kerja ini berfokus pada pengurangan risiko bencana dan membangun ketahanan melalui kombinasi penilaian risiko, kesiapsiagaan, tanggapan, dan langkah-langkah pemulihan. Kerangka ini menekankan kebutuhan untuk mengatasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap risiko bencana dan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko dan pembangunan ketahanan. Kerangka kerja ini dapat digunakan untuk menganalisis implementasi Satu Data Bencana Indonesia dari segi potensinya untuk mendukung pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan. Satu Data Bencana Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pengurangan risiko bencana, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Nopriadi dkk. (2020) menganalisis potensi Satu Data Bencana Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional. Studi tersebut menemukan bahwa sistem tersebut dapat berkontribusi pada pembangunan nasional dengan meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data terkait bencana, mempromosikan pengambilan keputusan berbasis bukti, dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang terkoordinasi dan terintegrasi. Kajian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan untuk mewujudkan potensi penuh Satu Data Bencana Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah kualitas data dan privasi, serta kebutuhan untuk memastikan akses

yang setara ke data dan informasi sistem. Studi lain oleh Wardani et al. (2021) menganalisis dampak Satu Data Bencana Indonesia terhadap pengurangan risiko bencana dan pembangunan nasional di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa sistem tersebut telah berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana yang lebih efektif, terutama dalam hal peningkatan pengumpulan dan analisis data. Studi ini juga menyoroti perlunya kolaborasi dan koordinasi yang lebih kuat di antara para pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, implementasi Satu Data Bencana Indonesia untuk pembangunan nasional dapat dianalisis dari perspektif pembangunan nasional yang menekankan perlunya mendorong ketahanan, pemerataan, dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menganalisis potensi dan tantangan Satu Data Bencana Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional, para peneliti dapat mengembangkan rekomendasi untuk memperkuat dampak sistem pengurangan risiko bencana dan pembangunan nasional di Indonesia.

3. Tinjauan Pelaksanaan Satu Data Bencana Indonesia yang Sedang Berjalan

Kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat diperlukan terutama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang yang berkaitan dengan penanggulangan bencana perlu mengumpulkan data statistik dan geospasial untuk menilai risiko, bencana, dampak, dan pendanaan penanggulangan bencana. Data statistik dapat diperoleh dari data literatur, sensus, survei yang relevan, dan sumber data resmi lainnya sesuai dengan format permintaan data standar yang telah

ditetapkan. Basis Data Bencana Nasional tidak harus dikumpulkan oleh BNPB secara fisik akan tetapi data tersebut dapat diarsipkan melalui portal Satu Data Bencana, yang dapat dilihat dan digunakan untuk berbagai statistik bencana alam melalui sistem kueri basis data, yang dapat digunakan untuk menghitung indikator, peringkat risiko dan pascabencana, serta kebutuhan statistik lainnya yang muncul terkait untuk menghadapi bencana alam. Sesuai dengan pedoman Badan Informasi Geospasial (BIG), basis data dikelola menggunakan kode dan format yang kompatibel dengan penggunaan sistem informasi geografis. Berbagai platform data bencana yang ada seperti InaRISK, InaSAFE, DIBI, IRBI, dll. terintegrasi untuk memberikan fleksibilitas yang melekat pada database bencana dalam hal skala geografis dan tingkat analisis terperinci, yang memungkinkan input dasar yang sama digunakan kembali untuk analisis di skala geografis yang berbeda.(BNPB, 2019)

Rencana pembangunan nasional negara di tingkat nasional dan lokal idealnya menggabungkan data terkait bencana, seperti memasukkan penilaian risiko bencana dalam perencanaan tata guna lahan dan membangun ketahanan terhadap bencana sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk mengatasi kemiskinan multidimensi. Misalnya, konstruksi di area dengan kemungkinan paparan bahaya yang tinggi dapat dibatasi atau dibuat untuk memenuhi persyaratan khusus guna meningkatkan ketahanan struktur terhadap potensi bencana. Intervensi ini juga dapat memberikan manfaat tambahan untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat yang terkena dampak. Ini karena mengurangi kemiskinan dapat membantu membangun ketahanan terhadap bencana, dan sebaliknya juga demikian.

Beberapa inisiatif telah dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga

saat ini, antara lain forum, pertemuan, seminar, bahkan pengembangan prototipe Portal Satu Data Bencana Indonesia oleh BPS dan BNPB. Namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena tidak mudah mengubah paradigma yang sebelumnya menganggap data sebagai “Silo” di masing-masing pemangku kepentingan menuju integrasi data sesuai dengan prinsip platform Satu Data Bencana Indonesia. Satu Data Bencana Indonesia menganut asas Satu Data Standar, artinya standar tersebut berlaku untuk semua jenis data yang kegiatan statistik atau produksi informasi geospasialnya memiliki tujuan konseptual dan operasional yang sama yang dapat didefinisikan memiliki tujuan yang sama. Berkenaan dengan informasi geospasial, satu standar data dalam perspektifnya berlaku untuk satu standar peta yang sama.

Dari hasil wawancara dengan nara sumber dan pengambilan data ada beberapa temuan diantaranya bahwa koordinasi statistik sangat penting untuk keberhasilan Satu Data Bencana Indonesia karena kompilasi statistik biasanya membutuhkan kerja sama yang erat antara badan penanggulangan bencana dan produsen data resmi lainnya. Saat ini, pengumpulan data terkait bencana di negara-negara terfragmentasi dan tersebar di berbagai badan pengatur, disajikan dalam format yang berbeda, dan mengikuti kerangka kerja yang beragam. Organisasi yang biasanya bertanggung jawab untuk menghasilkan data resmi di tingkat nasional atau subnasional termasuk badan penanggulangan bencana (atau badan koordinasi serupa), kantor statistik nasional, badan geografi atau pemetaan, kementerian yang bertanggung jawab atas infrastruktur kritis dan tanggap darurat, dan mungkin organisasi non-pemerintah berfokus pada penelitian atau membantu upaya

pengurangan dan respons risiko bencana. (Perka BNPB, 2023)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa koordinasi statistik secara tipikal mencakup dua aspek: harmonisasi konseptual dan manajemen kelembagaan. Harmonisasi konseptual melibatkan memastikan bahwa semua institusi yang berpartisipasi menggunakan definisi variabel yang identik, yang didefinisikan dengan baik, diketahui secara universal, dan dikodekan dengan cara yang konsisten. Selain itu, metodologi dibagikan dan didokumentasikan selama semua tahap produksi statistik, dan setelah data akhir diproses. Selama tahap awal pengembangan, perluasan, atau pengembangan kembali basis data, sangat penting untuk membentuk kelompok kerja teknis yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam penyediaan data. Mekanisme ini sangat penting untuk memastikan koherensi di seluruh pengumpulan data dasar, pemrosesan data, kompilasi, agregasi, diseminasi, dan analisis untuk satu set dasar statistik terkait bencana. Kelompok kerja teknis harus memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang terminologi dan isu-isu metodologi kritis

Keberhasilan Satu Data Bencana Indonesia sebagai acuan penanggulangan bencana dalam menjaga momentum pembangunan nasional terletak pada peraturan yang memberikan prosedur operasional standar untuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan analisis statistik. Lembaga-lembaga ini diberi mandat untuk mengumpulkan data statistik dan geospasial untuk mengevaluasi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Informasi ini diperoleh dari sumber-sumber seperti sensus, survei yang relevan, dan sumber data resmi

lainnya. Oleh karena itu, badan koordinasi harus mengembangkan model standar untuk memanfaatkan data ini jika ingin mencapai ketahanan yang lebih besar terhadap bencana. Praktek manajemen bencana bervariasi tergantung pada mandat undang-undang dari lembaga pemerintahan di berbagai negara. Biasanya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Nasional Setara (BPBD) memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan pengamatan awal dampak bencana segera setelah kejadian, mengoordinasikan tanggap darurat dan upaya pemulihan, dan memberikan laporan resmi kepada pemerintah dan media. Sedangkan BIG dan BPS sesuai dengan fungsinya bertanggung jawab menyediakan metodologi produksi data secara geospasial dan statistik. Undang-undang atau kebijakan nasional seringkali mengatur beberapa fungsi pengumpulan data awal, seperti mengidentifikasi dan mengkode kejadian bencana dan mengelola data orang hilang. Semua praktik metodologis dan prosedur penanggulangan bencana untuk pengumpulan dan pengelolaan data harus dibagikan dengan badan-badan yang terlibat dalam kelompok kerja teknis untuk memastikan koordinasi.

Berdasarkan temuan analisis dan interpretasi data, penilaian pascabencana dan pengumpulan data yang ditargetkan mendapat perhatian lebih untuk bencana yang relatif besar. Untuk bencana yang lebih kecil dan lebih sering, data tentang dampaknya juga dikumpulkan dan disusun ke dalam basis data nasional, tetapi ini lebih bergantung pada sumber statistik resmi yang teratur dan berkesinambungan, seperti survei rumah tangga atau informasi dari sistem pemantauan di daerah rawan bahaya. Oleh karena itu, penentuan prioritas juga harus mempertimbangkan penanganan tantangan dalam mencakup risiko bencana yang luas atau bencana skala

kecil hingga menengah, yang mungkin tidak tercermin dengan baik dalam kompilasi data dan analisis dampak yang ada.

KESIMPULAN

Keberhasilan Satu Data Bencana Indonesia untuk pembangunan nasional terletak pada peraturan yang memberikan prosedur operasional standar untuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan analisis statistik. Oleh karena itu, badan koordinasi harus mengembangkan model standar untuk memanfaatkan data ini jika ingin mencapai ketahanan yang lebih besar terhadap bencana. Masalah seperti lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah untuk penanggulangan bencana dapat diselesaikan dengan membentuk kelompok kerja teknis. Pokja tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Nasional Setara (BPBD) yang bertanggung jawab mengumpulkan pengamatan awal dampak bencana segera setelah kejadian, mengoordinasikan upaya tanggap darurat dan pemulihan, serta memberikan laporan resmi kepada pemerintah dan media, BIG dan BPS yang bertanggung jawab dalam menyediakan metodologi produksi data/informasi masing-masing dalam hal geospasial dan statistik. Semua praktik metodologis dan prosedur penanggulangan bencana untuk pengumpulan dan pengelolaan data harus dibagikan dengan badan-badan yang terlibat dalam kelompok kerja teknis untuk memastikan koordinasi. Integrasi ini sangat penting dalam membuat indikator. Untuk mencapai hal ini diperlukan kemitraan yang kuat antara badan penanggulangan bencana, kantor statistik nasional, dan sumber data resmi lainnya yang relevan. Sebagai penutup, SDBI memanfaatkan data yang tersedia untuk menghasilkan

informasi yang relevan untuk semua tahapan penanggulangan bencana, termasuk pengkajian risiko, pencegahan, dan mitigasi, serta untuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan pemulihan, serta pembiayaan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana guna mengurangi risiko dan dampak bencana untuk pembangunan nasional.

REFERENSI

- BNPB (2019). *Buku Satu Data Bencana*. Terjemahan dari Kerangka Kerja Statistik Terkait Bencana Diambil dari http://communities.unescap.org/system/files/final_drsg_manual_190918_reduced.pdf.
- Covid19 (2023). *Percepatan Penanganan Covid 19 di Indonesia* Diambil dari <https://covid19.go.id/artikel/2023/01/02/percepatan-penanganan-covid-19-di-indonesia-update-2-januari-2023#>, diakses pada 15 Februari 2023
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana.
- Mukaram, AM, & Kusumasari, B. (2019). *Konteks kebijakan satudata bencana di Indonesia*. Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik, 8(2), 227-239
- Nopriadi, D., Prabowo, A., & Kusumasari, B. (2020). *Satu Data Bencana Indonesia sebagai Alat Pembangunan Nasional: Analisis Potensi dan Tantangannya*. Jurnal Penelitian Bencana, 15(4), 735-746
- UNESCAP (2018) *Kerangka Kerja Statistik Terkait Bencana, Kelompok Pakar Statistik Terkait Bencana di Asia dan Pasifik, Bangkok*.
- PBB (2015). *Prinsip Dasar Statistik Resmi PBB – Pedoman Pelaksanaan, 2015*. Draft Akhir. Januari, 2015. Divisi Statistik PBB. New York. <https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx>.
- Wardani, AK, Prabowo, A., & Sari, RA (2021). *Satu Data Bencana Indonesia, Pengurangan Risiko Bencana, dan Pembangunan Nasional: Sebuah Analisis Konseptual*. Jurnal Penelitian Bencana, 16(2), 302-312
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana.